

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) atau yang disebut PTPN XII (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang agribisnis dan agri-industri. PTPN XII memiliki 34 kebun yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, tiga kantor wilayah yang berada di Jember dan Malang, satu kantor perwakilan di Jakarta dan lima anak perusahaan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, PT Rolas Nusantara Medika, PT Industri Gula Glenmore, dan PT Rolas Nusantara Tambang. Pusat kantor direksi PTPN XII terdapat di Surabaya. Oleh karena itu, karyawan yang akan berhubungan langsung dengan anak perusahaan, melakukan pemantauan langsung terhadap 34 kebun dan melaksanakan tugas di luar kantor direksi akan melakukan perjalanan dinas.

Tata cara melakukan perjalanan dinas dan besaran biaya yang dikeluarkan telah diatur dalam surat keputusan direksi nomor: Kpts-014/PTPN/SDM/5/2012 (PTPN XII, 2012). Surat keputusan ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 1996, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-11/MBU/2009, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-193/MBU/2010, dan Keputusan Pemegang Saham No. SK-97/MBU/2012 tanggal 01-03-2012. Pengajuan perjalanan dinas pada PTPN XII (Persero) diawali dengan menulis pengajuan pada buku perjalanan dinas serta melampirkan dokumen yang terkait dengan penugasan (berupa memo/surat perintah dari atasan). Setelah itu, karyawan

akan meminta persetujuan perjalanan dinas dari asisten kepala bagian dan atau kepala bagian yang bersangkutan. Buku tersebut nantinya akan diserahkan kepada bagian umum untuk dibuatkan surat perjalanan dinas (SPD), perhitungan perjalanan dinas (PPD), surat jalan dan surat permintaan pembayaran (SPP).

Perhitungan biaya perjalanan dinas dilakukan oleh staf bagian umum dengan menggunakan bantuan *Excel*. Biaya yang dihitung meliputi biaya transport dan biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas ini terdiri dari biaya penginapan, uang saku, uang makan, uang cucian dan transport lokal. Karyawan yang melakukan perjalanan dinas luar wilayah dan luar negeri akan mendapat uang muka sebesar 80% dari uang saku perjalanan dinas. Jadi, staf bagian umum harus membuatkan PPD uang muka dan SPP uang muka untuk melakukan pencairan dana di bagian keuangan. Perhitungan dan pembuatan PPD untuk karyawan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan dalam wilayah dilakukan sebelum melakukan perjalanan dinas oleh staf bagian umum.

Dokumen PPD dan SPP harus ditandatangani oleh kepala bagian umum sebelum diberikan kepada karyawan dan bagian keuangan. Karyawan yang telah melakukan perjalanan dinas dalam kota dan dalam wilayah dapat mencairkan dana biaya perjalanan dengan menyerahkan SPD, PPD dan surat jalan ke bagian umum. Karyawan yang telah melakukan perjalanan dinas luar wilayah dan luar negeri dapat mencairkan sisa dana biaya perjalanan dinas dengan menyerahkan PPD uang muka dan SPP uang muka ke bagian umum. Selanjutnya, bagian umum akan membuatkan SPP dari rekapitulasi PPD per periode untuk perjalanan dinas dalam kota dan dalam wilayah serta membuatkan PPD dan SPP dari sisa biaya yang telah

diterima untuk luar wilayah dan luar negeri. SPP ini harus mengacu pada SPP uang muka yang telah diterima sebelumnya.

Dari proses bisnis yang berjalan saat ini ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah adanya penyalahgunaan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi karena tidak adanya informasi histori perjalanan dinas karyawan untuk mengetahui frekuensi dan tanggal pengajuan ke tempat tujuan yang sama. Selain itu berkas-berkas perjalanan dinas terletak di bagian umum sehingga kepala bagian yang bersangkutan harus ke bagian umum untuk meminta berkas-berkas terkait histori karyawan. Permasalahan kedua adalah adanya keterlambatan pembuatan dokumen sampai tenggat waktu keberangkatan. Permasalahan ini disebabkan tidak adanya daftar prioritas pembuatan dokumen dan perhitungan perjalanan dinas yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Permasalahan yang ketiga adalah adanya manipulasi biaya dan kesalahan perhitungan membuat kepala bagian harus mengecek ulang hasil perhitungan. Hal ini disebabkan karena biaya-biaya yang ditetapkan bisa diganti dan uraian biaya yang tidak sesuai bisa ditambahkan. Permasalahan yang keempat adalah pencarian kembali SPP uang muka untuk pembuatan penyelesaian perjalanan dinas memerlukan waktu yang lama karena pengarsipan SPP yang berdasarkan tanggal. Permasalahan yang kelima adalah tidak ada peninjauan ulang dalam penggunaan biaya perjalanan dinas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penetapan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas sehingga tidak adanya laporan penggunaan anggaran. Permasalahan yang keenam adalah kepala bagian umum dan bagian direksi tidak dapat mengevaluasi pelaksanaan perjalanan dinas dikarenakan tidak adanya laporan penggunaan biaya perjalanan dinas per periode dan per bidang,

laporan jumlah perjalanan dinas per periode dan per bidang, laporan penggunaan biaya perjalanan dinas per wilayah tujuan dan histori perjalanan dinas yang dilakukan karyawan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi PTPN XII (persero) memerlukan sebuah sistem informasi perjalanan dinas. Dengan adanya sistem ini, kepala bagian dapat dengan mudah melihat histori perjalanan dinas karyawan karena semua data perjalanan dinas tersimpan di *database* yang dapat dipakai secara bersamaan. Selain itu, staf bagian umum dapat membuat prioritas pengerjaan karena data yang ditampilkan dapat bebas diurutkan berdasarkan tanggal pengajuan, tanggal keberangkatan ataupun selisih tanggal pengajuan dan tanggal keberangkatan. Dengan aplikasi ini, manipulasi biaya dapat dicegah karena biaya-biaya perjalanan dinas di-*default* oleh sistem dan hanya pengguna yang memiliki hak akses tertentu yang dapat menggantinya. Perhitungan biaya perjalanan dinas juga dilakukan oleh sistem sehingga tidak ada kesalahan perhitungan. Sistem juga mampu menyajikan informasi dalam bentuk laporan mengenai histori perjalanan dinas karyawan, perbandingan penggunaan biaya dan jumlah pengajuan perjalanan dinas per bagian, per periode, per bidang dan per wilayah tujuan, penggunaan anggaran per bulan dan per tahun, dan histori realisasi anggaran.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun sistem informasi perjalanan dinas pada PT Perkebunan Nusantara XII (persero).

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dari sistem ini adalah, sebagai berikut:

1. Standar perhitungan biaya perjalanan dinas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Kpts-014/PTPN/SDM/5/2012.
2. Tidak membahas akuntansi perjalanan dinas.
3. Penetapan anggaran menggunakan pendekatan *zero based budgeting*.
4. Kebutuhan anggaran untuk perjalanan dinas per bulan diasumsikan sama.
5. Notifikasi peringatan pengerjaan perhitungan, pembuatan dan penyelesaian dokumen perjalanan dinas dilakukan melalui sms dan email.
6. Tidak membahas penanganan biaya yang telah dikeluarkan pada pembatalan perjalanan dinas

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada PT Perkebunan Nusantara XII (persero).

1.5 Manfaat

Dengan adanya sistem ini diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat antara lain :

1. Dapat menyediakan informasi mengenai besaran biaya dan jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per periode, per bidang dan per karyawan sebagai saran dalam mengadakan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

2. Membantu perusahaan dalam meminimalkan kesalahan dalam perhitungan biaya perjalanan dinas.
3. Membantu perusahaan dalam memastikan penggunaan biaya perjalanan dinas sesuai dengan yang direncanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini secara sistematis dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil PTPN XII. Karyawan PTPN XII harus melakukan perjalanan dinas untuk berhubungan langsung dengan anak perusahaan dan pemantauan langsung terhadap 34 kebun karena kantor pusat PTPN XII terletak di Surabaya. Proses perjalanan dinas saat ini memiliki beberapa permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem informasi perjalanan dinas. Pada bab ini, juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan aplikasi, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori pendukung yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan proses pembuatan sistem yang meliputi teori perjalanan dinas, anggaran, sistem informasi, *System Development Life Cycle (SDLC)*, *System Flow*, *Data Flow Diagram (DFD)*, *Entity Relationship Diagram (ERD)*, *Web*, *Hypertext Preprocessor (PHP)*, *SMS Gateway*, *Testing* dan penelitian terdahulu sebagai referensi pembuatan sistem.

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam menganalisa dan merancang sistem. Tahapan tersebut meliputi analisis sistem, rancangan sistem dan implementasi sistem. Tahapan analisis sistem dimulai dari kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari ketiga kegiatan tersebut akan digunakan untuk menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Tahapan selanjutnya adalah rancangan sistem yang terdiri dari data modeling, *process* modeling, dan rancangan antarmuka. Tahapan tersebut menghasilkan *System Flow*, *Context Diagram*, *Data Flow Diagram* (DFD), *Conceptual Data Model* (CDM), *Physical Data Model* (PDM), dan Rancangan *Input Output*. Tahapan terakhir adalah *coding* dan *testing*. *Coding* adalah kegiatan membuat sistem dari hasil rancangan sistem sedangkan *testing* adalah melakukan uji coba fungsi sistem.

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Pada bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan implementasi meliputi kebutuhan *hardware* dan *software*. Bab ini juga menjelaskan implementasi penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Penjelasan aplikasi meliputi tampilan aplikasi serta fungsi kontrol dalam aplikasi. Pada bagian evaluasi akan dilakukan pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* untuk membuktikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan tujuan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik.